

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL TAHUN 2010-2012 DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA

Ervina Anwar, Anderson Kumenaung, dan George Kawung

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : vheenaanwar@gmail.com*

ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat dana perimbangan yang cukup besar. Menurut Kawung (2008) kemampuan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih rendah, yakni sebesar 30.66% terhadap penerimaan daerah, yang artinya peranan PAD masih kurang dan perlu di tingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis perkembangan kemandirian fiskal dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi utara tahun 2010-2012. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan rumus rasio derajat kemandirian fiskal, dan untuk menghitung pengaruhnya digunakan analisis model regresi data panel dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Kemandirian Fiskal di daerah Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara, masih belum bisa dikategorikan mandiri, dimana rata-rata Rasio Kemandirian paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 0,01132. Sedangkan rata-rata rasio kemandirian yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Manado dengan besarnya rasio sebesar 0,149507. Pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Hal ini disebabkan masih rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Kemandirian Fiskal, dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

North Sulawesi to be one area that has a dependency on the central government's fiscal transfer is large enough. According Kawung (2008) the ability of North Sulawesi Province is still low, which is equal to 30.66% of the local revenue, which means that the role of PAD is still lacking and needs to be improved. This study aims to analyze the development of fiscal independence and the influence of economic growth on the fiscal independence of north Sulawesi province in 2010-2012. The analysis technique used is by using the ratio formula degree of fiscal independence, and used to calculate the effect panel data regression analysis using SPSS. The results showed Fiscal Independence at the district / city of North Sulawesi province, still can not be considered independent, where the average ratio is lowest Independence owned by Southeast Minahasa district is equal to 0.01132. While the average ratio of the highest independence is owned by the city of Manado with the ratio of 0.149507. Economic growth Regency / City Government of North Sulawesi has no significant effect on Fiscal Independence. This is due to the low ratio of independence which is owned by Regency / City in North Sulawesi

Keywords: Regional Inequality Index, and Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari orde baru menuju orde reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 2001 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berisikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau “uang mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Nurjanah, 2008).

Desentralisasi di perlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan Infrastruktur, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana (Suahasil dan Nurholis 2006). Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun di rasakan semakin jauh dari kenyataan karena ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat semakin besar sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli. Daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah akan mengalami tekanan fiskal yang kuat karena rendahnya kapasitas fiskal ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah.

Pelaksanaan Desentralisasi di daerah-daerah yang ada, dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Dengan adanya kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, bisa di lihat sampai di mana tingkat kemandirian daerah tersebut. Semakin minim(rendah) ketergantungan dana dari pusat, maka semakin nyata kualitas sumber daya daerah itu sendiri. Atau dengan kata lain, tingkat kemandiriannya lebih baik dengan di tunjang oleh faktor-faktor pendapatan asli daerah dan berbagai sector yang ada. pembagian kewenangan diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, di mana pada dasarnya seluruh kewenangan ada di daerah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat dan Provinsi di atur dalam PP No. 33 Tahun 2004, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan Pusat di

luar 5 kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu di dukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Di sadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang di miliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang di miliki. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang di ambil oleh pemerintahan daerah itu. (Tumangkeng, 2011)

Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan dua langkah strategis. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Waluyo, 2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relative lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam dari pada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. (Frida, 2009) bahwa hampir di semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat yaitu daerah yang terletak di Pulau Jawa serta secara historis sudah kuat. Sementara di luar Jawa hanya beberapa Provinsi menunjukkan peningkatan. Dilihat dari Rasio Keuangan Kecukupan Diri (RKKD) di bawah 20%. Ini berarti bahwa kabupaten/kota masih tergantung penuh terhadap pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,21% dan yang mempengaruhi pertumbuhan PAD yang belum memberikan peranan tambahan terhadap anggaran wilayah. (Rudi 2011).

Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat dana perimbangan yang cukup besar. Menurut Kawung (2008) kemampuan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih rendah, yakni sebesar 30.66% terhadap penerimaan daerah, yang artinya peranan PAD masih kurang dan perlu di tingkatkan. <http://pupungph.wordpress.com/tag/desentralisasi-fiskal/>

Tabel 1.1
Rasio Kemandirian Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012

No.	Nama Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian Fiskal	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	0.02003	6.49
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0.01636	8.09
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0.02528	7.44
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0.01428	8.32
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0.04211	5.64
6	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0.02408	8.32
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	0.01318	5.88
8	Kabupaten Minahasa	0.03897	6.61
9	Kabupaten Minahasa Selatan	0.01025	6.37
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	0.01166	6.43
11	Kabupaten Minahasa Utara	0.032	7.01
12	Kota Bitung	0.04769	7.98
13	Kotamobagu	0.01126	7.55
14	Kota Manado	0.16902	8.71
15	Kota Tomohon	0.01431	7.1
Rata-rata		0.032699	7.196

Sumber : Data diolah, BPS Sulut 2014

Pada table 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa derajat kemandirian fiskal pada tahun 2012 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat rendah yaitu dengan rata-rata sebesar 3.26% dimana peran pemerintah pusat masih dominan daripada pemerintah daerah. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara masih bergantung pada penerimaan pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat kita lihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara tahun Anggaran 2010-2012

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	Hasil (%)
2010	418.737.661	650.530.096	64%
2011	451.754.886	703.999.207	64%
2012	633.650.533	933.065.767	68%

Sumber : Datadiolah, BPS Sulut 2014

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara tiga tahun terakhir rata-rata 65.3% hal ini dapat dikategorikan cukup tinggi (didas 50%). Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah di tuntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. (Suparmoko, 2002).

Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkaitan dengan stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih banyak dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk dapat melakukan pembangunan, pemerintah daerah di harapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus di lakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil yang dimiliki. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional. (Adisasmita).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka merupakan suatu kebutuhan yang urgen untuk memahami dan sekaligus mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh pelaksanaan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Dapat melakukan pembangunan secara mandiri dan tidak terlalu tergantung pada alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan dari pemikiran dan latar belakang permasalahan di atas, penelitian dengan judul "*Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara*"

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan di teliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemandirian fiskal daerah Sulawesi utara tahun 2010-2012?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012?

Tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah yang ada yaitu bertujuan untuk :

1. Menganalisis perkembangan kemandirian fiskal provinsi Sulawesi utara tahun 2010-2012.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

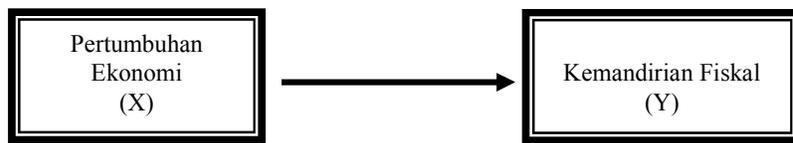
1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Manado dalam perumusan kebijakan pembangunan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

- Hasil penelitian di harapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan.

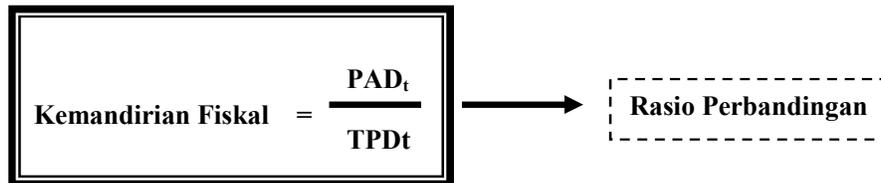
Kemandirian Fiskal, Dari penelitian ini, kemandirian fiskal didefinisikan sebagai kondisi kemandirian daerah yang diukur sebagai rasio antara PAD dan TPD yang dinyatakan dalam satuan Rasio.

Pertumbuhan Ekonomi, Dari penelitian ini pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam satuan persen.

Kerangka Konsep



Kemandirian fiskal di hitung menggunakan rumus sebagai berikut :



Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, “Diduga ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Sulawesi Utara”.

2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan di publikasikan oleh instansi tertentu. Data dari penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara.

Model Analisis

Analisis regresi sederhana adalah suatu analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen yaitu Kemandirian Fiskal dengan bantuan SPSS.

Model estimasi :

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Dimana:

- Y =Kemandirian Fiskal
- a =Konstanta dari persamaan regresi
- X =Pertumbuhan Ekonomi
- E =Term of error
- b =Koefisien Regresi

Untuk mengukur rasio kemandirian fiskal digunakan rumus :

$$DF_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100\%$$

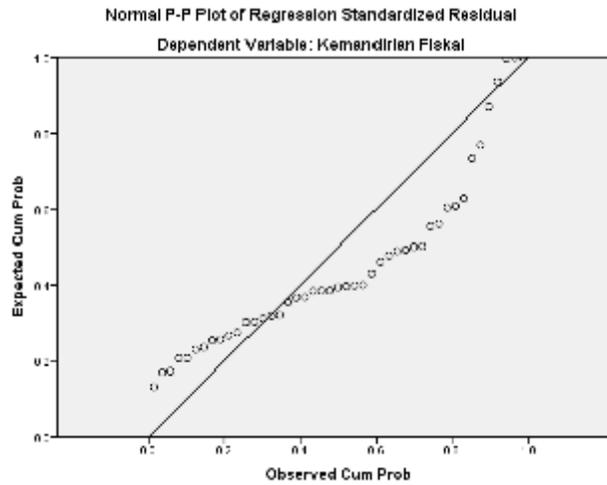
Dimana :

- DF_{it} = Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota i, pada tahun t
- PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota i, pada tahun t
- TPD_{it} = Total Penerimaan Daerah kabupaten/kota i, pada tahun t

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi yang normal. Pengujian Normalitas akan mengarahkan teknik statistik apa yang akan digunakan untuk uji pengambilan keputusan (Statistik Inferensi). Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresivariabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusinormal ataukah tidak mempunyai distribusi normal



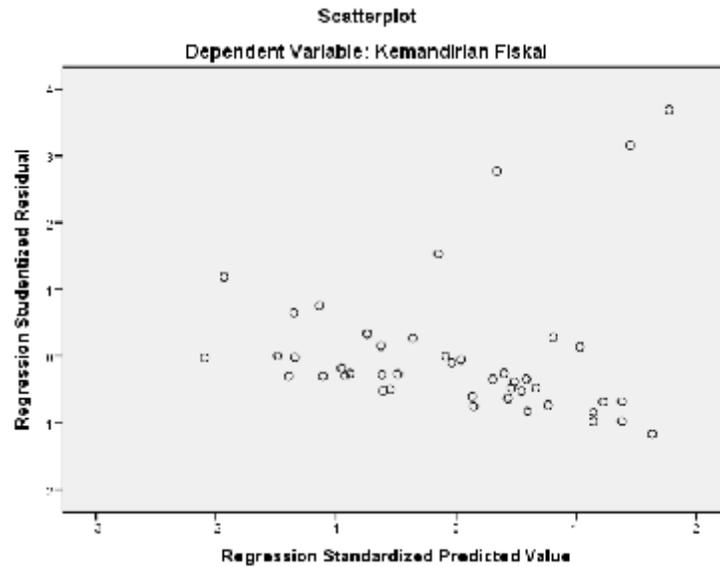
Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar mengikuti garis normal. Hal ini berarti data yang digunakan untuk menganalisa pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel dependen memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dengan demikian, persamaan regresi linear dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi asumsi klasik normalitas data.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot di tunjukan pada gambar berikut :



Gambar Scatterplot

Dari hasil pengujian dengan melihat gambar 4.2 Scatterplot, bahwa titik – titik tersebut menyebar secara acak pada sumbu Y. Hal ini berarti model regresi sederhana dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik heterokedastisitas dan layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresilinear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2009). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW).

Tabel 4.19 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.267 ^a	.072	.050	.03394312	1.643

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal

Angka *Durbin-Watson* dalam table diatas menunjukkan angka sebesar 1,905. Model regresi dinyatakan bebas autokorelasi jika memenuhi kriteria $1,64 < DW < 2,35$. Hal ini berarti, persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini dinyatakan bebas autokorelasi ($1,64 < 1,643 < 2,35$).

Korelasi (r)

Korelasi adalah hubungan linear (searah bukan timbal balik) antara dua variabel atau lebih. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Correlations

		Kemandirian Fiskal	Pertumbuhan Ekonomi
Pearson Correlation	Kemandirian Fiskal	1.000	.267
	Pertumbuhan Ekonomi	.267	1.000
Sig. (1-tailed)	Kemandirian Fiskal	.	.038
	Pertumbuhan Ekonomi	.038	.
N	Kemandirian Fiskal	45	45
	Pertumbuhan Ekonomi	45	45

Dari tabel diatas dapat dilihat Hubungan Pertumbuhan Ekonomidengan Kemandirian Fiskal adalah sebesar 0,267 dan signifikan pada $\alpha = 0,038$. Hal ini berarti, terdapat hubungan yang lemah dan signifikan antara variabel Kemandirian Fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Regresi Linear Sederhana

Pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian fiskal dapat dilihat pada besarnya koefisien regresi dari variabel kemandirian fiskal. Besarnya koefisien regresi dari kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Koefisien Regresi dan t hitung

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.033	.037		-.891	.378
	Pertumbuhan Ekonomi	.949	.521	.267	1.820	.076

a. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Tabel 4.6, persamaan regresi linear untuk menjelaskan pengaruh dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal adalah $Y = -0.033 + 0,949 X$.

Besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal adalah sebesar koefisien regresi 0,949. Besarnya pengaruh ini tidaklah signifikan yang dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.820 > 2,017$) dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini berarti, pengaruh Pertumbuhan Ekonomi tidaklah signifikan terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian-penelitian terdahulu Pertumbuhan Ekonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, tetapi dalam penelitian ini, Pertumbuhan Ekonomi

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal di provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara masih belum dapat meningkatkan Kemandirian Fiskal di Sulawesi Utara. Masih banyaknya daerah Kabupaten/Kota yang bergantung pada pemerintah pusat yang tercermin dari rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki menjadi indikasi dari tidak berpengaruhnya Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal di Sulawesi Utara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirangkumkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal di daerah Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara, masih belum bisa dikategorikan mandiri, dimana rata-rata Rasio Kemandirian paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 0,01132. Sedangkan rata-rata rasio kemandirian yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Manado dengan besarnya rasio sebesar 0,149507.
2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Daftar Pustaka

- [Anonim]. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. UU No. 23/2004 dan UU No 33/2004, Jakarta : Cemerlang.
- Aryanto, Rudi. 2011. "*Analisis kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di sumatera selatan*" [Jurnal]
- Badrudin, Rudi. 2012. "*Ekonomika Otonomi Daerah*" Edisi 1 Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Boediono. 1992. "*Teori Pertumbuhan Ekonomi*". Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. 2002. "*Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*". World Bank Institute. Available: <http://www.worldbank.org>
- Fajrin, F. Frida. 2009. "*Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah*". [Skripsi].
- Gujarati, Domandar. 1999. "*Dasar-dasar Ekonometrika*". Erlangga. Jakarta.
- Ladjin, Nurjanna. 2008. "*Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)*" [Tesis] Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2002. "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*" Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. "*Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*".
- Mangkoesebroto, Guritno 1993. "*Ekonomi Publik*", Edisi Ke-3, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

- Siagian R. Altito. 2010. *“Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah (Studi kasus kabupaten/kota Propinsi Jawa Barat)”* [Skripsi], Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sianturi, Simonsen Y. 2011 *“Dampak Desentralisasi Fiska lterhadap Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah (Studi kasus Kabupaten/Kota Sumatera Utara)”* [Skripsi], Semarang: Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, Robert A. 2005. *“Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa Perjalanan 100 Tahun.”* Editor: Anhar Ganggang. Jakarta :Yayasan Tifa.
- Suparmoko, M. 2002. *“Pengantar Ekonomika Makro”* Edisi 4 Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sutarno, Mudrajat Kuncoro. *“Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah :Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang”*. Jakarta: Erlangga.
- Tarigan, Robinson. 2004. *“Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *“Pembangunan Ekonomi di DuniaKetiga”*. Edisi Kesembilan, Jakarta: Erlangga.
- Tumangkeng, Steva Y. L. 2011, *“Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara”* [Karya Ilmiah] Universitas Sam Ratulangi : Manado.
- Waluyo, Joko 2007. *“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Indonesia”* [Jurnal], Depok: UI.
- <http://pupungph.wordpress.com/tag/desentralisasi-fiskal/> (9 November 2013)